

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara administratif, Kabupaten Cirebon memiliki 20 kecamatan, 412 desa, dan 12 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 107.029 Ha sedangkan luas perairan pesisir mencapai 399,6 Km² dengan garis pantai membentang 77,97 km. Jika dilihat dari bentuk bentang alam dan kondisi geografisnya, seluruh desa di Cirebon terbagi menjadi 3 kawasan, yakni kawasan perbukitan/bukit, datar, dan gunung/pegunungan. (Laporan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024). Dengan posisi demikian menyebabkan penduduknya juga tinggal dalam lingkungan yang berbeda, masing-masing kawasan memiliki suhu, intensitas cahaya, matahari, kelembaban yang bervariasi juga.

Perbedaan yang terjadi karena faktor lingkungan ini nyatanya juga berdampak pada kondisi fisik, kebiasaan, kesehatan, potensi serta tantangannya. Mereka yang hidup di kawasan pegunungan, identik dengan kesuburan tanah dan oksigen yang baik, segala jenis tumbuhan juga sangat mudah didapat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sedangkan di kawasan dataran rendah yakni pesisir, dengan udara yang cenderung panas dan konsumsi garam yang cukup tinggi, juga memiliki pola aktivitas yang bertumpu pada kondisi laut (Poluan & Gerungan, 2023).

Pada dasarnya, perbedaan pola aktivitas dan letak suatu wilayah inilah yang dinamakan desa, menurut Soetarto dan Sihalolo (2014) yang menjelaskan awal terbentuknya suatu desa dikarenakan menetapnya suatu komunitas manusia pada lokasi tertentu, bermukim serta mencari penghidupan di lokasi tersebut. Berawal dari dusun-dusun kecil sampai tahap selanjutnya terbentuklah pemimpin dusun atau bahkan pemimpin desa. Dengan begitu, satu desa dengan desa lain cenderung memiliki pengelolaan, karakter, serta ciri khas yang juga berbeda.

Dalam definisi lain, desa juga sebagai sebuah organisasi yang dikelola oleh pemerintah desa (Anas, 2024). Sebagai pemerintahan yang

paling kecil, paling bawah, paling depan, dan paling dekat dengan masyarakat (Ayu, 2025). Penduduknya sendirilah yang mengerti tentang situasi dan kondisi desanya. Namun, seiring berjalannya zaman, perubahan-perubahan juga kian terjadi di desa-desa. Pembangunan desa di Kabupaten Cirebon semakin berkembang melalui pendekatan pembangunan partisipatif, di mana masyarakat ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Perubahan yang terlihat antara lain pembangunan jalan desa, perbaikan irigasi, pengembangan usaha mikro, serta program pemberdayaan masyarakat. Perubahan terjadi di berbagai desa di Kabupaten Cirebon, seperti Desa Ciwaringin yang mengembangkan batik ekologis berbasis partisipasi masyarakat (Septianingrum, 2021), atau Desa Setupatok yang mengembangkan wisata berbasis komunitas untuk meningkatkan ekonomi warga (Aryani, 2022).

Perubahan ini dilakukan karena pembangunan berbasis partisipasi dianggap lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, serta memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan partisipatif dilakukan melalui musyawarah desa (MUSDES), diskusi dengan kelompok masyarakat, kerja bakti, hingga program swadaya yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan hasil pembangunan (Henriyani, 2019).

Maka dari itu Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan merupakan elemen penting yang mencakup berbagai aspek. Masyarakat dapat berkontribusi melalui musyawarah, gotong royong, dan keterlibatan dalam perencanaan hingga evaluasi program pembangunan (Sembel at al., 2020). Dalam hal ini Semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga kelompok pemuda dan perempuan, memiliki peran strategis. Keterlibatan masyarakat dapat terlihat di tingkat dusun, desa, atau wilayah tertentu yang menjadi fokus pembangunan (Riyanto & Kovalenko, 2023). Hal ini diperlukan pada setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, karena

pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung cenderung lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Widodo, 2019). Masyarakat dapat berkontribusi dengan memberikan ide, melaksanakan program bersama, serta menjaga hasil pembangunan agar tetap berfungsi optimal (Suryana et al., 2022).

Berdasarkan jurnal "*Community Participation in Rural Development*" oleh Mansuri dan Rao (2004), Partisipasi masyarakat terbukti meningkatkan kualitas pembangunan melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan. Salah satu kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi berbagai masalah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Penelitian oleh Gunanta Ginting (2024) Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan mereka dalam menentukan program serta pembangunan desa secara partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini mengubah paradigma penyusunan program dan anggaran yang sebelumnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat (*top down*) menjadi lebih partisipatif dengan pendekatan *bottom-up* (Ginting et al., 2024).

Dalam konteks pembangunan partisipasi dapat diartikan sebagai kesetaraan dalam kesempatan dan akses terhadap sarana. Kesetaraan gender merujuk pada kesamaan kedudukan yang berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam seluruh aktivitas pada seluruh taraf kehidupan (Amir & Suhartini, 2018). Oleh karena itu, setiap orang harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan perekonomiannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Meskipun perbedaan dalam pendapatan ekonomi di antara individu tidak bisa dihindari, dan tidak mungkin semua orang menjadi kaya atau mapan secara ekonomi, kekayaan dan kemakmuran yang diperoleh melalui praktik ketidakadilan pada akhirnya akan menimbulkan masalah dan kesenjangan sosial (Fikriyyah, 2020).

Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang partisipasi dalam pembangunan dengan memberikan peran kesetaraan terhadap perempuan dan laki-laki adalah Surah At-Taubah ayat 7 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُعِينُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya : “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana” (Q.S. At-Taubah ayat 71).

Secara tersurat, ayat ini mengakui kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Dalam tafsir modern, muncul pandangan pada ayat ini terbuka terhadap partisipasi perempuan dalam ruang publik. Kemudian memberikan interpretasi pandangan yang sama dengan nilai-nilai kesetaraan gender yang semakin maju pesat di era masyarakat modern. Mereka menegaskan pentingnya perempuan berpartisipasi secara aktif di berbagai bidang, bukan hanya sebagai pendukung bagi laki-laki. Pandangan ini muncul sebagai tanggapan terhadap perubahan sosial, di mana kesetaraan gender dan demokrasi semakin diakui sebagai prinsip dasar yang harus diterima oleh hukum dan norma sosial (Huda, 2024).

Maka dari itu Pemetaan partisipatif sebagai alat bantu merancang perencanaan pembangunan desa. Proses pemetaan partisipatif merupakan bagian integral dari perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Metode pemetaan partisipatif mulai dikembangkan sejak tahun 1980 (Wibowo, 2020). Dalam pendekatan ini, masyarakat dilibatkan secara aktif untuk memetakan kondisi wilayah mereka, menggali potensi lokal, dan memahami karakteristik daerahnya dengan lebih baik. Selain itu, pemetaan partisipatif juga berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan tentang cara mengidentifikasi potensi wilayah, yang kemudian dapat digunakan sebagai

dasar dalam penyusunan profil daerah dan perencanaan program pembangunan (Kurnianingtyas et al., 2022). Metode ini melibatkan pemanfaatan peta atau pengetahuan lokal individu atau masyarakat yang telah mengenal dan memahami lingkungan tempat tinggal mereka (Utami, 2021).

Penelitian ini menggunakan Pendekatan partisipatif dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG). Metode pemetaan partisipatif ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan tata ruang, serta menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan (Surdia et al., 2022). Perkembangan teknologi yang pesat memberikan kemudahan untuk mencari dan mendapatkan informasi, sama seperti *Website GIS* Sebagai sistem informasi geografis penggabungan design grafis pemetaan, terdiri dari komponen peta digital, analisis geografis, program Komputer dan data base yang saling terhubung yang tergabung dalam web *design* serta web pemetaan.

Selain pemetaan partisipatif dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG), kemudian pemetaan partisipatif secara sosial yaitu mengidentifikasi struktur sosial, dinamika komunitas, jejaring, dan relasi antar kelompok masyarakat dilakukan dengan *Focus group discussion* (FGD) atau Diskusi fokus pada kelompok, wawancara mendalam, atau analisis jejaring sosial tujuannya untuk memetakan aktor-aktor kunci, kebutuhan masyarakat, serta potensi konflik atau kolaborasi dalam wilayah tersebut. Pemetaan spasial yaitu menggambarkan elemen fisik dan geografis, seperti batas wilayah, penggunaan lahan, infrastruktur, serta sumber daya alam, dengan menggunakan alat GIS, *drone mapping*, atau sketsa peta berbasis komunitas manfaatnya untuk memberikan visualisasi ruang yang mendukung pengambilan keputusan berbasis lokasi dan memetakan aksesibilitas terhadap fasilitas atau sumber daya. Terakhir pemetaan sektoral yaitu menganalisis isu atau sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, atau lingkungan dalam satu wilayah dengan

menggunakan survei sektoral, analisis data statistik, atau studi kasus mendalam, manfaatnya menyoroti prioritas sektor dan potensi pengembangan spesifik (Perrina, 2021).

Potensi dalam melakukan pembangunan didukung dalam kebijakan regulasi seperti UU Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan landasan hukum dan dukungan terhadap otonomi desa, termasuk dalam perencanaan pembangunan. Selain itu adopsi teknologi seperti pemetaan partisipatif dan penggunaan aplikasi berbasis data memungkinkan perencanaan yang lebih presisi dan transparan. Keterlibatan masyarakat yaitu partisipasi masyarakat desa, terutama dalam musyawarah desa, menjadi kekuatan untuk menghasilkan rencana pembangunan yang inklusif dan sesuai dengan aspirasi warganya (Djahmiq & Salahudin, 2022).

Namun dalam melakukan perencanaan pembangunan mempunyai tantangan tersendiri seperti, masih banyak aparat desa yang belum memiliki kemampuan memadai dalam mengelola bantuan maupun merancang program untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran dana desa. Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia di masyarakat, yang kurang mampu terlibat dalam pengelolaan, pengawasan, serta pemanfaatan dana desa akibat minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggali serta mengembangkan potensi yang tersedia, lemahnya penguasaan teknologi, pemerintah desa masih terfokus pada pembangunan fisik (Henriyani, 2019).

Desa Citemu merupakan wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya alam seperti potensi perikanan, pertanian. Sebagian besar masyarakat Desa Citemu bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil. Namun, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar, masyarakat masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan hasil produksi dan pemasaran. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur serta akses terhadap teknologi modern dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi kendala utama yang perlu diatasi.

Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah mendorong pemuda desa salah satunya Pemuda *Romme* yang berasal dari RT/RW 02/02 Dusun 02 untuk terlibat aktif dalam pemetaan partisipatif karena pembangunan yang inklusif itu harus melibatkan suara dari orang muda yang mana mempunyai *visualisasi* desa masa depan mereka. Pemetaan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah mereka. Metode ini tidak hanya membantu masyarakat memahami kondisi daerahnya secara lebih mendalam, tetapi juga membuka ruang bagi mereka untuk berkontribusi dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Selama proses *live in*, penulis melakukan berbagai kegiatan, seperti diskusi dengan kelompok pemuda, ibu-ibu, pemerintah desa, kelompok nelayan, dan pendampingan dalam pengumpulan data lapangan.

Desa Citemu memiliki sumber daya laut yang melimpah dan mayoritas masyarakat nya bekerja sebagai nelayan dalam desa dan luar desa, karena mayoritas masyarakat nelayan pemerintah Desa Citemu membuat kelembagaan sosial yaitu kelompok usaha nelayan (KUB) terdapat 9 ketua dalam 10 anggota nelayan tujuannya untuk pemberdayaan serta membantu masa-masa kesulitan nelayan, seperti tenggelam dilaut, mengumpulkan dana untuk sedekah laut, meninggal, sakit dan lain sebagainya, dimana sesama nelayan mengumpulkan dana dan dukungan kepada nelayan yang terkena musibah, KUB sendiri mempunyai bangunan seperti bangsal, Kongsi pendopo kurang perawatan dan tidak produktif, dahulu tempat tersebut untuk kegiatan pelelangan ikan dan rajungan namun sekarang sudah tidak beroperasi kembali. KUB yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tidak berfungsi optimal, bahkan banyak di antaranya yang gedungnya tidak terpakai dan tidak terawat. Gedung-gedung yang seharusnya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat desa malah terbengkalai, sehingga berpotensi menambah beban anggaran tanpa hasil yang nyata.

Kemudian lemahnya perencanaan pembangunan di Desa Citemu yang sering kali disebabkan oleh tidak adanya data yang akurat serta kurangnya sistem perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Data yang tidak memadai menjadi hambatan utama dalam upaya pembangunan, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pemerintah lainnya. Menurut Ibu Nurhayati ketua dusun 1 di Desa Citemu “ *Buku profil desa saja sudah hilang, banyak dokumen-dokumen hard file desa hilang karena kuwu sebelum ini terpidana korupsi dana desa, mangkanya pdf profil desa, batas wilayah saja tidak akurat banyak data yang keliru*”.

Desa Citemu juga mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan karena mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan perencanaan yang kurang tepat sasaran, sering kali proyek pembangunan menjadi terbengkalai atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Program bantuan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin atau rentan pun terkendala, sehingga tidak memberikan dampak yang maksimal.

Menurut Bapak Halim EKBANG (Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat) “*Pemdes baru saja melakukan pendataan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) namun desa tidak diberikan hasil pendataan tersebut, jadi hanya masuk pada pusat pemerintah nasional, terkadang kami pemerintah desa tidak mempunyai data-data demografi, kependudukan, kesehatan dan lain sebagainya karena pihak BPS langsung diberikan kepusat*”. Dalam hal ini pemerintah pusat pun tidak menjamin desa mempunyai data.

Kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam manajemen pembangunan desa, terutama dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan data, perencanaan yang tepat, serta pemantauan pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah dan memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di desa-desa,

termasuk dalam pengelolaan KUB, agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Penelitian oleh Gunanta Ginting (2024) bahwa tingkat partisipasi dalam Perencanaan pembangunan di Desa Kandui, Kecamatan Timang dalam musyawarah perencanaan pembangunan berjalan baik namun masih terkendala rendahnya kesadaran dari masyarakat tentang peran dan tanggung jawab dalam setiap prosesnya dan tingkat partisipasinya hanya pada tahap pengambilan keputusan. Maka dari itu pemerintah perlu memberikan bimbingan dan menganalisis kebutuhan dan masalah yang ada di masyarakat atau pemerintah meningkatkan akses informasi dengan memfasilitasi pemerintah desa untuk membuat website resmi desa tentang pembangunan Desa Kandui.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan menghasilkan peta yang lebih representatif. Namun, studi-studi tersebut lebih banyak dilakukan di wilayah pedesaan dengan tantangan infrastruktur atau potensi desa wisata, sementara aspek penerapan di desa pesisir seperti Desa Citemu masih jarang diteliti. Kemudian penting untuk melihat tingkat partisipasi pemuda *Romme* dalam pemetaan partisipatif yang dilakukan di RT/RW 02/02 Dusun 02 Desa Citemu. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan kebijakan yang inklusif. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tingkat partisipasi adalah Tangga Partisipasi Arnstein (*Arnstein's Ladder of Participation*), yang membagi partisipasi menjadi delapan tingkatan, mulai dari non-partisipasi hingga kendali warga. Dalam konteks ini, partisipasi pemuda *Romme* di Desa Citemu dalam pemetaan partisipatif dapat dianalisis menggunakan model ini untuk menentukan sejauh mana mereka memiliki kendali dan keterlibatan dalam proses pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji proses, tingkat partisipasi pemuda *Romme* dan hasil pemetaan

partisipatif untuk mendukung perencanaan dan pembangunan berkelanjutan di Desa Citemu. Hasilnya diharapkan tidak hanya menjadi referensi bagi desa serupa, tetapi juga memberikan panduan bagi pengambil kebijakan dalam memanfaatkan pemetaan partisipatif untuk pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengambil judul **“Partisipasi Pemuda *Romme* dalam Perencanaan Pembangunan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon”**. Mengingat dengan adanya pemetaan partisipasi ini, Penelitian ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat dapat memberikan masukan berdasarkan pengetahuan lokal yang mereka miliki, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pembangunan desa dan mendorong partisipasi yang lebih besar. Kemudian dengan data yang lebih akurat, Desa Citemu dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Ini akan mengurangi risiko proyek-proyek pembangunan yang mangkrak atau tidak tepat sasaran.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penetapan batasan ruang lingkup kajian agar pembahasan dalam penelitian tetap selaras dengan judul yang telah ditentukan. Secara prinsip, ada dua tujuan utama dalam menentukan fokus penelitian. Pertama, untuk menetapkan batasan studi yang jelas (*boundaries*). Kedua, untuk menentukan kriteria dan eksklusi dalam penelitian.

1. Proses Partisipasi

Proses partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pemuda di Desa Citemu dalam upaya pemetaan yang melibatkan partisipasi aktif pemuda dan pemerintah Desa Citemu dalam mengidentifikasi, menggambarkan, dan menganalisis wilayah mereka sendiri berdasarkan pengalaman serta pengetahuan lokal dengan tujuan untuk perencanaan pembangunan di Desa Citemu.

2. Tingkat Partisipasi Pemuda *Romme*

Tingkat partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Merujuk pada sejauh mana keterlibatan pemuda *Romme* dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Citemu. Tingkat partisipasi ini dapat dikategorikan berdasarkan model partisipasi Arstein 1969 dalam 8 tangga tingkatan partisipasi.

3. Hasil dari Partisipasi

Hasil proses partisipasi yang dilakukan pemuda *Romme* dalam penelitian ini menghasilkan berbagai *output* yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan. Data yang dihasilkan akan membantu desa dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, dan penggunaan lahan yang lebih baik. Kemudian Meningkatkan Partisipasi masyarakat, pengetahuan baru, serta kesadaran pemuda *Romme* terkait informasi desa.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Pemuda *Romme* dalam Proses Menyusun Perencanaan Pembangunan di Desa Citemu ?
2. Bagaimana Hasil Partisipasi Pemuda *Romme* untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Desa Citemu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Partisipasi pemuda *Romme* dalam proses menyusun perencanaan pembangunan di Desa Citemu.
2. Untuk Mendeskripsikan Hasil partisipasi pemuda *Romme* untuk mendukung perencanaan pembangunan Desa Citemu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan atau wawasan sebagai sumber referensi tentang partisipasi masyarakat

bagi para pendidik, dan dapat dijadikan acuan oleh para ilmuwan untuk meneliti lebih lanjut.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru di bidang pemetaan partisipatif, perencanaan pembangunan desa, sistem informasi desa khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ilmu-ilmu sosial dan budaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan peneliti sejenisnya dan menjadi bahan pertimbangan, bahan perbandingan bagi pemberdayaan masyarakat khususnya pada teori partisipasi masyarakat, sistem informasi berbasis *website* desa, serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi kajian akademik dan juga sebagai bahan dokumen untuk penelitian lebih lanjut.
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk memberikan Ilmu dan wawasan baru untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di jurusan pengembangan masyarakat islam, terkhusus untuk mendapatkan gelar sarjana sosial S.Sos, dalam bidang pengembangan masyarakat islam.
- d. Bagi Desa, Penelitian ini membantu desa mendapatkan acuan pemetaan partisipatif dalam pembangunan desa, informasi lokal masyarakat yang dapat diintegrasikan pada sistem informasi desa, sehingga data yang tersedia mencerminkan kondisi nyata di lapangan.